

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
MENINGKATKAN INOVASI UMKM DI DAERAH.
(STUDI DI BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG)**

Oleh : I Gede Robby Setiawan¹ dan Ni Ketut Sudianing²

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan Inovasi UMKM di Daerah, dan untuk mengetahui faktor penghambat pada Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

Metode pengumpulan data yang digunakan kualitatif dengan instrument pengumpulan data berupa observasi yakni, teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti, wawancara/interview yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumentasi yang ada pada organisasi dan relevansinya dengan penelitian.

Hasil penelitian Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* (Pemerintahan yang baik) dalam meningkatkan inovasi UMKM di Daerah yang meliputi transparansi, supremasi hukum, akuntabilitas, kesetaraan dan mengembangkan inovasi UMKM di daerah.

Untuk mengetahui peran Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan Inovasi UMKM di Kabupaten Buleleng yang meliputi partisipasi masyarakat melalui pembinaan inovasi organisasi prangkat daerah (OPD), membina kecamatan dalam mengembangkan inovasi desa sesuai dengan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), mengadakan kompetisi inovasi dalam bentuk lomba kreasi inovasi tingkat Kabupaten Buleleng, sebagai fasilitator dalam mendukung produk UMKM masyarakat dalam proses pengurusan legalitas atau perijinan sebagai inovasi.

Beberapa faktor penghambat yang ditemukan, secara internal terbatasnya anggaran pemerintah Kabupaten Buleleng, kualifikasi pendidikan pegawai masih belum sesuai, terbatasnya sarana dan prasarana kantor dan eksternal seperti kurangnya perhatian dari perangkat desa maupun kecamatan terkait dengan inovasi, kurangnya pemahaman inovasi dari masyarakat, dan kurangnya kemampuan / pengetahuan teknologi untuk mempublikasikan inovasi.

Rekomendasi yang disampaikan agar Pemerintah Kabupaten Buleleng bisa meningkatkan anggaran untuk masyarakat yang memiliki inovasi, dapat menyesuaikan kualifikasi pendidikan para pegawai, memberikan sarana dan prasarana kantor yang cukup, memberikan perhatian dan pemahaman yang lebih untuk masyarakat serta memberikan pengetahuan atau pelatihan kepada masyarakat dalam bidang teknologi.

Kata kunci : Prinsip-prinsip *Good Governance*, Balitbang dan UMKM

¹Staf Balitbang Kabupaten Buleleng: Email: setiawanrobby@gmail.com

²Staf Pengajar Universitas Panji Sakti: Email: sudianing18@gmail.com

1. Pendahuluan

Good Governance atau (pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi banyak orang di Indonesia. Pemahaman mereka mengenai *good governance* (Pemerintahan yang baik) berbeda-beda, sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan *good governance* (Pemerintahan yang baik) menganggap akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Pemerintah “dapat memberikan pelayanan secara prima serta memberikan keterbukaan informasi (Juliawati dan Sandiasa, 2019:4). Banyak diantara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik *governance* (Pemerintahan) yang lebih baik maka kualitas pelayanan publik semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan masyarakat. Selama lima tahun terakhir, pemahaman mengenai praktik *governance* (Pemerintahan) di Indonesia telah memperlihatkan kemajuan yang semakin berarti. Mulai tersedia banyak data yang dapat di gunakan untuk memahami praktik *governance* (Pemerintahan) di Indonesia. Informasi mengenai praktik *governance* (Pemerintahan) dalam berbagai tingkat pemerintahan di Indonesia sudah mulai banyak tersedia. (Dwiyanto : 2017).

Inovasi daerah di satu sisi merupakan peluang bagi daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah, namun di sisi lain, inovasi daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, dalam peraturan pemerintah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme inovasi daerah sebagai suatu kebijakan daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi, bentuk dan kriteria inovasi daerah, pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah, uji coba inovasi daerah, penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan inovasi daerah, diseminasi dan pemanfaatan inovasi daerah, pendanaan, informasi inovasi daerah, pembinaan dan pengawasan. Dalam pengembangan UMKM, inovasi ini juga sangat penting diterapkan agar apa yang menjadi tujuan inovasi tersebut dapat tercapai, yaitu peningkatannya kesejahteraan para pelaku UMKM dan meningkatkan daya dukung pertumbuhan ekonomi

daerah melalui UMKM. Sebagai gambaran perkembangan UMKM di Kabupaten Buleleng dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.1. Perkembangan Jumlah Umkm Berdasarkan Klasifikasi Usaha Di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 - 2021

No	Klarifikasi Usaha	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		Formal	Non Formal	Jumlah	Formal	Non Formal	Jumlah	Formal	Non Formal	Jumlah
1	Usaha Mikro	5,114	20,934	26,048	5,709	38,961	44,670	7,007	40,304	47,311
2	Usaha Kecil	3,481	5,813	9,294	3,655	5,921	9,576	3,662	5,992	9,654
3	Usaha Menengah	192	4	196	217	9	226	225	9	234
TOTAL		8,787	26,751	35,538	9,581	44,891	54,472	10,894	46,305	57,199

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Dapat dilihat dari tabel diatas perkembangan Usaha Mikro tiap tahun berdasarkan klasifikasinya yaitu mengalami peningkatan.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil, dan dapat dilihat dari tabel diatas perkembangan Usaha Kecil tiap tahun berdasarkan klasifikasinya yaitu mengalami peningkatan.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. dan dapat dilihat dari tabel diatas perkembangan Usaha Menengah di tiap tahun nya sedikit lebih meningkat.

Bedasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *good governance* (Pemerintahan yang baik) di Daerah pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana Peran Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah Dalam Mengembangkan Inovasi UMKM Di Kabupaten Buleleng ?
3. Apakah Faktor Penghambat Inovasi Pada UMKM Di Kabupaten Buleleng?

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* (Pemerintahan yang baik) di daerah, pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui seberapa besar peran Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah dalam meningkatkan Inovasi UMKM di Daerah.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam meningkatkan inovasi UMKM di daerah.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkahlaku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti Bungin (2012:32).

Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah, Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah, Kepala Bidang Sosial Dan Pemerintahan, Kepala Bidang Inovasi Dan Teknologi. Orang pada latar penelitian dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan, mempertimbangkan pengetahuan mereka yang memahami tentang masalah dan mereka yang berada di dalam lingkungan tersebut yang dipandang mampu memberikan informasi yang akurat tentang masalah tersebut.

Fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. Fokus penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah, masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian, sehingga fokus penelitian dapat berkembang atau berubah

sesuai dengan pola pikir yang bersifat “*emercial induktif* (kenyataan dan induktif)” segala ditentukan dari data yang sebenarnya diperoleh di lapangan.

Penelitian ini berlokasi di Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang berada di jalan Pahlawan no. 1 Singaraja, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dalam upaya meningkatkan inovasi UMKM di daerah. Alasan pemilihan lokasi penelitian disini karena lokasinya mudah di jangkau atau di cari karena berada di pusat kota dan di lingkup kantor Bupati Buleleng, dan juga karena data-data yang diperlukan sebagai bahan penelitian cukup lengkap dan tersedia.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* (Pemerintahan yang baik) di daerah pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

Kunci utama dalam memahami *good governance* (Pemerintahan yang baik) adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance* (Pemerintahan yang baik). Prinsip-prinsip *good governance* (Pemerintahan yang baik) antara lain :

3.1.1 Transparansi

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Yakni Drs. Made Supartawan, MM yaitu : Penerapan prinsip transparansi di Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah yaitu segala program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah akan di informasikan kepada masyarakat, melalui media sosial dan website, agar masyarakat yang membutuhkan informasi tentang segala program penelitian bisa berkoordinasi langsung ke badan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.

Selain itu, juga di sampaikan oleh Kepala Bidang Sosial Dan Pemerintahan Ketut Ariawan, S.Sos yaitu : Transparansi terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan didasari atas usulan oleh prangkat daerah yang membutuhkan program penelitian dan

pengembangan di badan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah. selanjutnya terhadap hasil program kegiatan tersebut akan disampaikan melalui rencana kerja yang di informasikan melalui wibesite badan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terkait dengan prinsip transparansi atau keterbukaan pelaksanaan program kegiatan dan pengambilan kebijakan sudah di jalankan di Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah. Seluruh proses pemerintah dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan di pantau.

3.1.2 Supremasi Hukum

Berikut hasil wawancara, supremasi hukum segala program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku sesuai ketentuan, selain sudah mengacu pada peraturan, para pejabat juga harus mengetahui dasar-dasar hukum agar menimbulkan sesuatu yang positif dan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku. Dan mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan (Drs. Made Supartawan, MM).

Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Made Suharta, S.Kom, M.A.P : Tujuan supremasi hukum yaitu di dalam proses pelaksanaan program kegiatan, administrasi, evaluasi dan kepegawaian harus di laksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang khusus dan jelas, agar para pejabat dan para pegawai pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dengan teliti dan bertanggung jawab.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa segala program, kegiatan yang dilaksanakan di Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, berdasarkan regulasi dan aturan yang berlaku, sesuai dengan pendapat bahwa salah satu kepentingan dan ciri good governance adalah “partisipasi, adanya aturan hukum (rule of law), transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi (Remaja, 2017: 27) .

3.1.3 Akuntabilitas

Berikut hasil wawancara dengan Drs. Made Supartawan, MM : akuntabilitas Dalam pelaksanaan segala program dan kegiatan, dilaksanakan sesuai rencana strategis

dan indikator kinerja utama badan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah. Tugas rinci untuk setiap kegiatan dilibatkan orang-orang yang kompeten di bidangnya, dan hal ini menjamin penuh dalam menjalankan segala program dan kegiatan agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang di rencanakan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Made Suharta, S.Kom, M.A.P : Kewajiban para pegawai untuk mempertanggungjawabkan tugas yang di jalankan baik dari pemerintah, maupun dari para atasan, akan di sampaikan atau di laporkan pada setiap bulannya melalui laporan hasil kinerja dan rapat internal yang di lakukan secara rutin pada setiap bulannya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas rinci untuk setiap kegiatan harus melibatkan orang-orang yang kompeten di bidangnya, untuk menjamin penuh dalam menjalankan segala program dan kegiatan agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang di rencanakan atau “menghasilkan praktik administrasi dan tatakelola yang efisien dan efektif” (Sandiasa & Sudianing, 2023: 20).

3.1.4 Kesetaraan

Hasil wawancara, kesetaraan dalam memberikan pelayanan terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah diberikan perlakuan yang sama, baik dari segi pelayanan publik terhadap perangkat daerah, organisasi sosial, lembaga akademisi negeri maupun swasta, kelompok maupun masyarakat diberikan perlakuan yang sama sesuai kebutuhan dan setandar operasional prosedur (SOP). (Drs. Made Supartawan, MM).

Hal senada juga disampaikan oleh Made Suharta, S.Kom, M.A.P: Kesetaraan memperlakukan kesamaan kepada para pegawai tanpa membeda-bedakan. memberikan hak-hak yang dimiliki oleh para pegawai, salah satunya dalam hal kenaikan pangkat untuk para pegawai yang sudah memenuhi syarat, kenaikan gaji berkala dan pemegang kesetaraan dalam pemegang jabatan, bahwa perempuan juga bisa memegang jabatan sebagai seorang kepala Dinas/Badan, Kepala Bidang dan Kasubbag.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa segala pelayanan baik pelayanan terhadap OPD dan masyarakat diberikan perlakuan yang sama sesuai kebutuhan dan setandar operasional prosedur (SOP).

3.2 Peran Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah Dalam Meningkatkan Inovasi UMKM Di Kabupaten Buleleng

Partisipasi Masyarakat bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis.

3.2.1 Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Made Mira Tri Yulia Ida Justisiana, ST.,M.A.P yaitu :

Peran Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah Dalam Meningkatkan Inovasi UMKM Di Kabupaten Buleleng yang meliputi partisipasi masyarakat yaitu :

1. Melakukan pembinaan, inovasi melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait inovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki desa / masyarakat dengan melibatkan camat dan aparat desa.
2. Membina kecamatan dalam mengembangkan inovasi yang ada di desa sesuai dengan potensi sumber daya alam (SDA) dan Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang ada.
3. Mengadakan kompetisi inovasi yang disebut dengan lomba kreasi inovasi tingkat kabupaten Buleleng, dengan tujuan untuk merangsang / membangkitkan daya tarik masyarakat dalam menciptakan dan mengembangkan inovasi.
4. Sebagai fasilitator dalam mendukung produk UMKM masyarakat untuk proses pengurusan legalitas atau perijinan dalam menjadikan inovasi. seperti mengurus hak kekayaan intelektual, desain kemasan serta mengurus legalitas ke badan pengawas obat dan makanan (BPOM) agar bisa melakukan pendistribusian produk di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
5. Memberikan petunjuk dalam memastikan produk melalui pasar online (*marketplace*) yang tersedia seperti shoppe, Tokopedia, Lazada dan sebagainya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Peran Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah dalam meningkatkan inovasi UMKM salah satunya

yaitu mengadakan kompetisi atau lomba-lomba inovasi, yang bertujuan untuk meningkatkan semangat masyarakat untuk tetap berinovasi.

3.2.2 Faktor Penghambat Inovasi UMKM di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Drs. Made Supartawan, M.M beliau menyebutkan ada dua faktor penghambat inovasi umkm di kabupaten buleleng yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- I. Faktor internal badan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah yaitu:
 - a) Terbatasnya anggaran pemerintah kabupaten buleleng untuk masyarakat yang memiliki inovasi dikarenakan masih dalam situasi pandemic Covid-19.
 - b) Kualifikasi pendidikan pegawai masih tidak sesuai.
 - c) Terbatasnya sarana dan prasarana kantor.
- II. Faktor eksternal badan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah yaitu:
 - a) Kurangnya perhatian dari prangkat desa maupun kecamatan terkait dengan inovasi.
 - b) Kurangnya pemahaman inovasi dari masyarakat.
 - c) Kurangnya kemampuan/pengetahuan teknologi untuk mempublikasikan inovasi.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ada faktor penghambat yang membuat kegiatan inovasi menjadi terhambat dan tidak berjalan dengan yang di rencanakan.

4. Penutup

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik) dalam meningkatkan inovasi UMKM di daerah. Meliputi transparansi, supremasi hukum, akuntabilitas, kesetaraan dan dapat mengembangkan inovasi UMKM di daerah.
2. Peran Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan inovasi UMKM di Kabupaten Buleleng yaitu : a).

melakukan pembinaan, inovasi melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait inovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki desa / masyarakat dengan melibatkan camat dan aparat desa, b). Membina kecamatan dalam mengembangkan inovasi yang ada di desa sesuai dengan potensi sumber daya alam (SDA) dan Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang ada, c). Mengadakan kompetisi inovasi yang disebut dengan lomba kreasi inovasi tingkat kabupaten buleleng, dengan tujuan untuk merangsang / membangkitkan daya tarik masyarakat dalam menciptakan dan mengembangkan inovasi, d). Sebagai fasilitator dalam mendukung produk umkm masyarakat untuk proses pengurusan legalitas atau perijinan dalam menjadikan inovasi. seperti mengurus hak kekayaan intelektual, desain kemasan serta mengurus legalitas ke badan pengawas obat dan makanan (BPOM) agar bisa melakukan pendistribusian produk di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, e). Memberikan petunjuk dalam memastikan produk melalui pasar online (*marketplace*) yang tersedia seperti shoppe, toko pedia, lasada dan sebagainya.

3. Faktor penghambat inovasi UMKM di Kabupaten Buleleng, ada dua faktor penghambat dalam inovasi diantaranya faktor internal maupun eksternal. Faktor tersebut sangat besar pengaruhnya dalam berinovasi, karena dengan adanya faktor-faktor penghambat tersebut, keinginan atau gairah masyarakat untuk berinovasi menjadi rendah dan semangatnya bisa semakin berkurang.

4.2 Saran-saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah dibahas pada BAB V dan dari penarikan beberapa kesimpulan diatas maka dapat diajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Buleleng bisa meningkatkan anggaran untuk masyarakat yang memiliki inovasi agar terus bisa berkembang.
2. Dapat menyesuaikan kualifikasi pendidikan para pegawai.
3. Memberikan sarana dan prasarana kantor yang cukup.
4. Memberikan perhatian yang lebih untuk masyarakat baik dari prangkat desa maupun kecamatan.

5. Memberikan pemahaman yang lebih dan khusus untuk masyarakat. Memberikan pengetahuan atau pelatihan kepada masyarakat dalam berteknologi agar bisa mempublikasikan inovasi lewat media sosial/online

Daftar Pustaka

- Bungin, 2012 *Analisa Data Kualitatif*. Rajawali Pres, Jakarta.
- Dewi Suryani, 2021 *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Dwiyanto, 2017 *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamirul, 2020 *Good Governance Dalam Perspektif Kualitas Pelayanan Publik*. CV.Pustaka Learning Center, Malang.
- Juliawati dan Gede Sandiasa, 2019. “Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng”. Dalam *Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No. 2 – Agustus 2019 P. 4*
- Moleong, 2007 *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Karya, Bandung.
- Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 *Tentang Inovasi Daerah*.
- Remaja, I Nyoman, 2017. “Penerapan Good Governance Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta Yang Berbasis Pelayanan”. Dalam *Prosiding Seminar : Revitalisasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Juni 2017 (P.27-40)*. Unit Penerbitan (UP) Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Unipas Singaraja. ISBN 978-979-17637-3-8)
- Robbins & Judge 2015, *Perilaku Organisasi*. PT Index, Jakarta
- Sandiasa Gede. 2020. Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Siaran RRI Singaraja.
- Sugiyono, 2009 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Silalahi, 2009 *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Trianto, 2009 *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif*. Kencana Prenada Media, Jakarta.